PT PUPUK ISKANDAR MUDA

Lobbying and Trade Associations Climate Alignment

Pedoman Keselarasan Iklim atas Keterlibatan Kebijakan Publik dan Keanggotaan Asosiasi

Tahun 2026

LEMBAR PENGESAHAN

LOBBYING AND TRADE ASSOCIATIONS CLIMATE ALIGNMENT

Dokumen *Lobbying and Trade Associations – Climate Alignment* ini telah ditinjau dan disetujui sebagai pedoman sekaligus bentuk komitmen PT Pupuk Iskandar Muda dalam memastikan bahwa keterlibatan Perusahaan pada kebijakan publik dan keanggotaan Perusahaan pada asosiasi selaras dengan strategi iklim Perusahaan dan tujuan Perjanjian Paris (*Paris Agreement)*.

PT Pupuk Iskandar Muda
Direksi,

Filius Yuliandi
Direktur Utama

Guntur Prasetyo
Direktur Operasi & Produksi

Koko Sudiro
Direktur Keuangan & Umum

Maimun
Direktur Manajemen Risiko

Daftar Isi

1. Komitmen PIM terhadap Aksi Iklim 4
1.1 Faktor Pendorong Keselarasan Iklim 4
1.2 Komitmen PIM terhadap Keterlibatan dalam Isu Perubahan Iklim 4
2. Struktur Tata Kelola dan Akuntabilitas untuk Keselarasan Iklim 5
2.1 Struktur Tata Kelola Keberlanjutan dan Iklim 5
2.2 Pengawasan Dewan Komisaris 6
2.3 Peran Direksi dan Tim Pengembangan dan Implementasi ESG 6
2.4 Akuntabilitas atas Keterlibatan Kebijakan Publik dan Keanggotaan Asosiasi 6
3. Posisi Kebijakan PIM terkait Perubahan Iklim 7
3.1 Kerangka Kebijakan Perusahaan terkait Perubahan Iklim 7
3.2 Posisi Kebijakan Publik yang Didukung Perusahaan 8
3.3 Posisi Kebijakan Publik yang Tidak Didukung Perusahaan 9
4. Peninjauan dan Pemantauan Keterlibatan dalam Kebijakan Iklim 10
4.1 Ruang Lingkup dan Pengelolaan Keanggotaan Asosiasi 10
4.2 Identifikasi Asosiasi dan Organisasi yang Relevan 10
4.3 Peninjauan dan Pemantauan Keterlibatan terkait Perubahan Iklim 10
4.3.1 Keterlibatan Langsung dalam Kebijakan Publik dan Kegiatan Lobi 11
4.3.2 Asosiasi dan Organisasi 12
4.4 Kerangka Penanganan Ketidakselarasan 14
4.5 Eskalasi atas Potensi Ketidakselarasan 14
4.6 Dokumentasi dan Pelaporan 14

1. Komitmen PIM terhadap Aksi Iklim

1.1 Faktor Pendorong Keselarasan Iklim

PT Pupuk Iskandar Muda ("PIM" atau "Perusahaan") merupakan anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) yang memproduksi amoniak, urea, pupuk NPK, dan hidrogen peroksida di Krueng Geukueh, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Perusahaan menyadari bahwa keterlibatan dalam kebijakan publik, baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui asosiasi produsen, asosiasi profesi, kamar dagang, forum industri, dan organisasi lainnya, dapat memengaruhi arah pengembangan kebijakan, peraturan, serta standar yang berlaku bagi industri pupuk dan petrokimia.

Proses produksi amoniak dan urea merupakan proses yang intensif energi dan menghasilkan emisi gas rumah kaca dalam jumlah yang material. Dengan karakteristik tersebut, kebijakan publik yang berkaitan dengan nilai ekonomi karbon, konservasi dan efisiensi energi, pengembangan teknologi penangkapan karbon, pengembangan amonia dan hidrogen rendah karbon, pengelolaan lingkungan, serta tata kelola pupuk memiliki dampak langsung terhadap profil emisi, struktur biaya, dan rencana investasi Perusahaan. Oleh karena itu, Perusahaan memandang keterlibatan dalam proses kebijakan publik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari komitmen iklimnya.

Dalam dokumen ini, keselarasan iklim merujuk pada sejauh mana posisi kebijakan, kegiatan advokasi, keterlibatan dalam proses regulasi, dan partisipasi PIM dalam asosiasi industri sejalan dengan jalur penurunan emisi gas rumah kaca yang kredibel serta tujuan Perjanjian Paris (Paris Agreement), yaitu menahan kenaikan suhu rata-rata global jauh di bawah 2°C dibandingkan tingkat pra-industri dan mengupayakan pembatasan kenaikan suhu hingga 1,5°C.

Keselarasan iklim tidak terbatas pada pernyataan umum mengenai dukungan terhadap aksi iklim. Penilaian keselarasan memerlukan pertimbangan terhadap informasi saat ini maupun informasi yang berorientasi ke masa depan, termasuk posisi kebijakan yang dinyatakan, kegiatan advokasi yang benar-benar dilakukan, masukan terhadap proses regulasi, rencana transisi, langkah implementasi, serta konsistensi kegiatan tersebut dari waktu ke waktu. Penilaian yang kredibel karenanya tidak hanya mempertimbangkan komitmen yang disampaikan secara publik oleh Perusahaan atau oleh suatu asosiasi, tetapi juga apakah tindakan yang dilakukan secara efektif mendukung transisi menuju emisi gas rumah kaca yang rendah dan pembangunan yang berketahanan terhadap perubahan iklim.

Pada saat yang sama, kegiatan advokasi yang tidak dikelola secara memadai dapat menimbulkan risiko ketidaksesuaian antara komitmen iklim Perusahaan dan posisi yang disampaikan oleh Perusahaan, perwakilannya, atau asosiasi yang diikutinya. Ketidaksesuaian tersebut dapat terjadi apabila suatu kegiatan keterlibatan atau posisi asosiasi berupaya melemahkan, menunda, menghambat, atau menghapus peraturan terkait iklim, target penurunan emisi, persyaratan efisiensi energi, perlindungan lingkungan, atau langkah lain yang mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon.

1.2 Komitmen PIM terhadap Keterlibatan dalam Isu Perubahan Iklim

PIM memandang keselarasan kegiatan lobi dan kegiatan keasosiasiannya sebagai bagian integral dari tata kelola iklim, manajemen risiko, dan akuntabilitas perusahaan. Pendekatan ini berlaku pada seluruh yurisdiksi dan lokasi tempat Perusahaan menjalankan kegiatan operasional, termasuk kompleks pabrik, kawasan perumahan dinas, kantor perwakilan, serta kegiatan distribusi dan pemasaran, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan konteks kebijakan yang berlaku pada masing-masing yurisdiksi.

Dalam pelaksanaannya, Perusahaan menerapkan pendekatan terstruktur untuk:

- Mengidentifikasi keterlibatan dalam kebijakan publik yang relevan dengan isu perubahan iklim serta keanggotaan pada asosiasi dan organisasi;
- Menetapkan pembagian tanggung jawab dan mekanisme persetujuan yang jelas;
- Menilai keselarasan posisi advokasi, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap komitmen iklim Perusahaan;
- Memantau kegiatan yang sedang berlangsung serta posisi kebijakan yang berorientasi ke masa depan;
- Memastikan ketersediaan bukti pendukung yang andal dan dapat diverifikasi;
- Mengidentifikasi potensi kesenjangan atau ketidakselarasan; dan
- Menerapkan tindakan korektif yang proporsional dan memiliki batas waktu yang jelas.

Perusahaan mengakui bahwa tidak ada satu indikator atau pernyataan publik yang dapat dijadikan dasar yang memadai untuk menunjukkan keselarasan iklim. Penilaian harus didukung oleh kombinasi bukti yang relevan, antara lain pernyataan kebijakan resmi, tanggapan terhadap konsultasi publik, masukan terhadap rancangan peraturan, catatan pertemuan, kegiatan kelompok kerja, komunikasi publik, posisi dalam pengambilan keputusan asosiasi, serta hasil advokasi yang terdokumentasi. Apabila informasi yang tersedia tidak lengkap atau tidak memadai, Perusahaan tidak mengasumsikan adanya keselarasan, melainkan meminta klarifikasi lebih lanjut atau mengklasifikasikan keterlibatan tersebut sesuai dengan kondisi yang ada.

Dengan demikian, PIM berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan keterlibatan dalam kebijakan publik dan keanggotaan asosiasi dilaksanakan secara etis, transparan, bertanggung jawab, dan selaras dengan:

- Tujuan Perjanjian Paris untuk menahan kenaikan suhu rata-rata global jauh di bawah 2°C dan mengupayakan pembatasan kenaikan suhu hingga 1,5°C;
- Kebijakan, komitmen, dan target iklim Pemerintah Republik Indonesia, termasuk Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia dan sasaran Net Zero Emission pada tahun 2060 atau lebih cepat;
- Strategi perubahan iklim dan roadmap dekarbonisasi Perusahaan, yang mencakup Clean Ammonia, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Renewable Energy Certificate (REC), pengelolaan kawasan konservasi, dan efisiensi energi;
- Kebijakan Keberlanjutan, kebijakan lingkungan, dan pendekatan manajemen risiko iklim Perusahaan;
- Sepuluh Prinsip United Nations Global Compact (UNGC), khususnya prinsip-prinsip lingkungan; dan
- Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Melalui kerangka ini, PIM memastikan bahwa keterlibatannya dalam kebijakan publik, baik secara langsung maupun melalui asosiasi, mendukung dan tidak menghambat penerapan aksi iklim yang efektif. Perusahaan juga bertujuan memperkuat transparansi, menjaga kredibilitas komitmen iklimnya, mengelola risiko regulasi dan reputasi, serta berkontribusi secara konstruktif terhadap transformasi industri pupuk dan petrokimia menuju produksi yang rendah karbon, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan berketahanan terhadap perubahan iklim.

2. Struktur Tata Kelola dan Akuntabilitas untuk Keselarasan Iklim

2.1 Struktur Tata Kelola Keberlanjutan dan Iklim

PIM menempatkan tata kelola sebagai fondasi utama dalam memastikan pengelolaan risiko dan peluang terkait perubahan iklim berjalan efektif. Dewan Komisaris dan Direksi menjalankan peran strategis dalam mengawasi, mengarahkan, dan mengevaluasi kebijakan serta strategi iklim Perusahaan, yang diintegrasikan ke dalam perencanaan bisnis jangka pendek, menengah, dan

panjang. Pengawasan tersebut dilaksanakan melalui mekanisme rapat berkala, pelaporan kinerja, serta peninjauan capaian inisiatif dekarbonisasi dan efisiensi sumber daya.

Struktur tata kelola ini menjadi landasan bagi pengelolaan keterlibatan Perusahaan dalam kebijakan publik dan keanggotaan asosiasi, sehingga setiap posisi yang disampaikan oleh atau atas nama Perusahaan memiliki jalur akuntabilitas yang jelas hingga tingkat Direksi dan Dewan Komisaris.

2.2 Pengawasan Dewan Komisaris

Pengawasan Dewan Komisaris terhadap isu Environmental, Social, and Governance (ESG) dan perubahan iklim, termasuk pengelolaan risiko dan peluang perubahan iklim, dilakukan melalui Komite Tata Kelola Terintegrasi, Pemantau Risiko, dan Investasi. Komite tersebut menerbitkan Telaah Kebijakan dan Pelaksanaan ESG PT Pupuk Iskandar Muda setiap semester atau dua kali dalam satu tahun. Dokumen telaah tersebut menjadi sarana bagi Dewan Komisaris untuk menyampaikan pandangan dan meningkatkan kualitas penerapan ESG, termasuk pengelolaan perubahan iklim dan keselarasan keterlibatan kebijakan publik Perusahaan.

2.3 Peran Direksi dan Tim Pengembangan dan Implementasi ESG

Pengawasan pada tingkat eksekutif dilakukan oleh Direktur Utama bersama Direktur Operasi & Produksi, Direktur Keuangan & Umum, dan Direktur Manajemen Risiko. Direksi bertanggung jawab memastikan bahwa isu perubahan iklim dan ESG dilaksanakan secara memadai, termasuk memastikan keselarasan posisi kebijakan publik Perusahaan dengan komitmen iklimnya.

Pelaksanaan operasional dijalankan oleh Tim Pengembangan dan Implementasi ESG yang dibentuk pertama kali berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 50/SK/DU/IM/V/2024. Tim ini dipimpin oleh Direktur Utama, berada di bawah koordinasi Direksi, dan dikoordinasikan secara harian oleh Senior Vice President (SVP) Tata Kelola & Manajemen Risiko. Tanggung jawab implementasi pada setiap pilar keberlanjutan dijalankan oleh fungsi manajerial terkait dengan garis akuntabilitas yang jelas, di mana koordinator bidang bertindak sebagai pemilik risiko (risk owner) yang berwenang mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko serta peluang pada lingkup tanggung jawabnya. Surat Keputusan Direksi ini, dilakukan pemutakhiran secara berkala sampai dengan saat ini.

SVP Tata Kelola & Manajemen Risiko menyampaikan laporan secara rutin kepada Direksi melalui rapat bulanan, dan laporan kepada Direksi serta Dewan Komisaris disampaikan setiap semester. Indikator kinerja utama (Key Performance Indicator/KPI) yang berkaitan dengan keberlanjutan memengaruhi pemberian insentif bagi Direksi, dengan cakupan antara lain penurunan emisi karbon dan peringkat ESG. Dengan demikian, akuntabilitas atas keselarasan iklim, termasuk keselarasan kegiatan keterlibatan kebijakan publik, terhubung langsung dengan sistem penilaian kinerja pada tingkat eksekutif.

2.4 Akuntabilitas atas Keterlibatan Kebijakan Publik dan Keanggotaan Asosiasi

Pengelolaan keanggotaan asosiasi, kegiatan organisasi, dan keterlibatan eksternal dikoordinasikan oleh fungsi-fungsi korporat terkait di bawah pengawasan Direktur Utama, dengan pembagian peran sebagai berikut:

- Fungsi Tata Kelola & Manajemen Risiko bertanggung jawab atas koordinasi penilaian keselarasan iklim, pemantauan posisi asosiasi, dan pengelolaan dokumentasi;
- Fungsi Keselamatan, Kesehatan Kerja & Lingkungan bertanggung jawab atas substansi teknis yang berkaitan dengan emisi, efisiensi energi, pengendalian pencemaran, dan kinerja lingkungan;
- Fungsi Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan dan Hubungan Masyarakat bertanggung jawab atas komunikasi publik dan pelibatan pemangku kepentingan;

- Fungsi Pengembangan Bisnis bertanggung jawab atas keterlibatan yang berkaitan dengan pengembangan produk dan bisnis rendah karbon; dan
- Fungsi Hukum dan Kepatuhan bertanggung jawab atas kesesuaian keterlibatan dengan peraturan perundang-undangan, Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Pedoman Perilaku, serta kebijakan Perusahaan mengenai keterlibatan dalam politik.

Koordinasi tersebut bertujuan memastikan bahwa seluruh keanggotaan dan partisipasi eksternal memberikan nilai strategis dan operasional bagi Perusahaan, mematuhi peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal, mendukung komitmen keberlanjutan dan iklim Perusahaan, serta tetap selaras dengan posisi kebijakan publik yang telah ditetapkan dalam dokumen ini.

3. Posisi Kebijakan PIM terkait Perubahan Iklim

3.1 Kerangka Kebijakan Perusahaan terkait Perubahan Iklim

PIM telah menetapkan kerangka kebijakan yang mengarahkan integrasi aspek keberlanjutan dan pertimbangan terkait perubahan iklim ke dalam tata kelola, strategi, dan kegiatan operasional Perusahaan. Kerangka tersebut terdiri atas:

- Kebijakan Keberlanjutan PT Pupuk Iskandar Muda Tahun 2025, yang mengatur komitmen pada aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola, termasuk penurunan emisi gas rumah kaca, konservasi sumber daya, perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan limbah, serta penguatan tata kelola keberlanjutan di seluruh rantai nilai;
- Kebijakan Sistem Manajemen PT Pupuk Iskandar Muda, yang mengintegrasikan Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015, Sistem Manajemen Energi ISO 50001:2018, Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai PP No. 50 Tahun 2012, Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016, serta sistem manajemen lainnya;
- Kebijakan Penurunan Pencemaran Udara Konvensional dan Gas Rumah Kaca, dengan target intensitas emisi maksimal 1,3 ton CO_2 ekuivalen per ton produk setiap tahun, mencakup inventarisasi emisi, substitusi sumber energi menjadi PLTS, perencanaan program blue ammonia, dan inovasi teknologi penangkapan emisi;
- Kebijakan Efisiensi Energi, dengan target konservasi dan efisiensi energi sebesar 1,1% per tahun, mencakup audit energi, penggantian peralatan tidak efisien, dan inovasi penggantian energi fosil menjadi energi terbarukan;
- Kebijakan Efisiensi Air dan Penurunan Beban Air Limbah, dengan target efisiensi air sebesar 2% per tahun dan penurunan beban pencemaran air limbah sebesar 5% per tahun untuk parameter total nitrogen dan amoniak;
- Kebijakan Pengurangan dan Pemanfaatan Limbah B3 (2% per tahun) serta Kebijakan 3R Limbah Padat Non-B3 (3% per tahun);
- Kebijakan Penilaian Daur Hidup (Life Cycle Assessment), yang menjadi dasar identifikasi titik kritis dampak lingkungan pada aspek energi, emisi, air, dan limbah;
- Kebijakan Pengelolaan Sampah, melalui prinsip *Reduce, Reuse* & *Recycle* sebesar 5% dari total timbulan sampah per tahun;
- Kebijakan Pelindungan Keanekaragaman Hayati, yang mencakup pengelolaan kawasan konservasi seluas 85 hektare melalui penanaman pohon dan konservasi flora dan fauna;;
- Kebijakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; dan
- Kebijakan dan Pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi yang mengacu pada ISO 31000:2018.

Secara keseluruhan, kebijakan-kebijakan tersebut menjadi landasan dalam pengelolaan dampak lingkungan, peningkatan efisiensi energi, penurunan emisi gas rumah kaca, perlindungan keanekaragaman hayati, serta penguatan ketahanan operasional Perusahaan. Perusahaan

menyadari bahwa komitmen umum pada bidang keberlanjutan belum cukup untuk menunjukkan keselarasan iklim yang kredibel. Oleh karena itu, kerangka kebijakan tersebut dilengkapi dengan posisi yang eksplisit terhadap isu-isu kebijakan publik tertentu sebagaimana diuraikan pada bagian berikut.

3.2 Posisi Kebijakan Publik yang Didukung Perusahaan

PIM menyatakan posisi berikut terhadap perkembangan kebijakan publik yang berkaitan dengan perubahan iklim dan berlaku bagi sektor industri pupuk dan petrokimia di Indonesia. Posisi tersebut menjadi acuan bagi seluruh kegiatan keterlibatan kebijakan publik yang dilakukan oleh atau atas nama Perusahaan, serta menjadi tolok ukur dalam menilai keselarasan posisi asosiasi yang diikuti Perusahaan.

Isu Kebijakan Publik	Posisi PIM	Dasar dan Penjelasan Posisi
Pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia dan sasaran Net Zero Emission 2060 atau lebih cepat	Mendukung	Perusahaan mendukung penetapan dan penguatan target penurunan emisi nasional beserta kerangka pelaksanaannya. Strategi perubahan iklim Perusahaan disusun untuk mendukung pencapaian target tersebut melalui lima program utama, yaitu Clean Ammonia, PLTS, REC, pengelolaan kawasan konservasi, dan efisiensi energi.
Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon, termasuk pajak karbon dan perdagangan karbon (Perpres No. 98 Tahun 2021 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021)	Mendukung	Perusahaan mendukung penerapan instrumen harga karbon yang diterapkan secara bertahap, dapat diprediksi, dan didasarkan pada data emisi yang terverifikasi. Perusahaan menilai instrumen harga karbon sebagai sarana untuk mendorong investasi pada teknologi rendah karbon, dan telah menyusun skenario dekarbonisasi untuk mengantisipasi pemberlakuan kewajiban fiskal terkait emisi karbon. Perusahaan tidak mendukung penundaan pemberlakuan instrumen tersebut.
Kerangka regulasi penangkapan dan penyimpanan karbon (Perpres No. 14 Tahun 2024 dan peraturan pelaksanaannya)	Mendukung	Perusahaan mendukung pembentukan kerangka regulasi, perizinan, dan tata kelola penyimpanan karbon yang memberikan kepastian hukum bagi investasi CCS/CCUS. Perusahaan merencanakan program pemanfaatan CCS/CCUS untuk Pabrik Amoniak dengan memanfaatkan Arun Gas Field sebagai fasilitas penyimpanan CO_2 pada tahun 2031.
Pengembangan amonia dan hidrogen rendah karbon sebagai bagian dari transisi energi nasional	Mendukung	Perusahaan mendukung kebijakan yang mendorong pengembangan rantai nilai amonia dan hidrogen rendah karbon, termasuk kejelasan definisi, standar, dan skema sertifikasi produk rendah karbon. Perusahaan telah melaksanakan studi kelayakan pabrik blue ammonia bersama Mitsui & Co. dan studi kelayakan pabrik green ammonia bersama Toyo Engineering.
Konservasi dan efisiensi energi pada sektor industri (Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2023)	Mendukung	Perusahaan mendukung kewajiban manajemen energi, audit energi, dan pelaporan konsumsi energi bagi pengguna energi skala besar. Perusahaan menerapkan Sistem Manajemen Energi ISO 50001:2018 dan menetapkan target efisiensi energi sebesar 1,1% per tahun.
Perluasan pemanfaatan energi terbarukan dan instrumen atribut energi terbarukan	Mendukung	Perusahaan mendukung kebijakan yang memperluas akses industri terhadap energi terbarukan, termasuk pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya dan penggunaan Renewable Energy Certificate. Perusahaan telah mengoperasikan PLTS pada fasilitas Gedung Bagging dan Gedung Diklat serta menerapkan REC pada Fasilitas Raw Water Intake, dan rencananya pada Tahun 2028 akan diterapkan pada Pabrik NPK dan H2O2.

Isu Kebijakan Publik	Posisi PIM	Dasar dan Penjelasan Posisi
Penguatan kewajiban inventarisasi, pelaporan, dan verifikasi emisi gas rumah kaca, termasuk pelaporan melalui Sistem Registri Nasional	Mendukung	Perusahaan mendukung perluasan cakupan dan peningkatan kualitas pelaporan emisi, termasuk perluasan bertahap menuju pelaporan Cakupan 3. Perusahaan telah melakukan perhitungan emisi Cakupan 1 dan Cakupan 2 serta mengungkapkan kinerja emisi dalam Laporan Keberlanjutan dan Laporan TCFD.
Penerapan standar pengungkapan keuangan terkait iklim (POJK No. 51/POJK.03/2017 dan adopsi standar pengungkapan keberlanjutan internasional)	Mendukung	Perusahaan mendukung penerapan standar pengungkapan iklim yang konsisten dan dapat dibandingkan, serta telah menyusun laporan dengan mengacu pada rekomendasi Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).
Pengembangan industri hijau dan standar industri hijau (Undang-Undang No. 3 Tahun 2014)	Mendukung	Perusahaan mendukung penetapan standar industri hijau, termasuk batasan intensitas energi dan emisi pada proses produksi, serta insentif bagi penerapan teknologi produksi bersih.
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengendalian pencemaran (Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021), termasuk program PROPER	Mendukung	Perusahaan mendukung penerapan baku mutu lingkungan yang ketat dan mekanisme penilaian kinerja melampaui ketaatan. Perusahaan berpartisipasi dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) dan memperoleh peringkat PROPER Emas pada tahun 2025. Perusahaan tidak mendukung pelonggaran baku mutu lingkungan.
Peningkatan efisiensi pemupukan dan praktik pemupukan presisi untuk menurunkan emisi pada tahap penggunaan produk	Mendukung	Perusahaan mendukung kebijakan dan program penyuluhan yang mendorong penggunaan pupuk secara tepat jumlah dan tepat waktu, karena praktik tersebut berkontribusi pada penurunan emisi dinitrogen oksida (N_2O) di sektor pertanian sekaligus menjaga produktivitas.

3.3 Posisi Kebijakan Publik yang Tidak Didukung Perusahaan

PIM tidak mendukung kebijakan publik maupun kegiatan advokasi yang secara tidak semestinya melemahkan, menunda, atau menghambat aksi iklim yang kredibel. Secara khusus, Perusahaan tidak mendukung:

- Pelonggaran atau penundaan penerapan baku mutu emisi, baku mutu air limbah, dan persyaratan perlindungan lingkungan lainnya;
- Penundaan atau pelemahan pemberlakuan instrumen nilai ekonomi karbon, termasuk pajak karbon dan perdagangan karbon;
- Pelemahan kewajiban inventarisasi, pelaporan, dan verifikasi emisi gas rumah kaca, termasuk penyempitan cakupan pelaporan;
- Pelemahan atau penundaan kewajiban konservasi dan efisiensi energi bagi pengguna energi skala besar;
- Pembentukan hambatan yang sebenarnya dapat dihindari terhadap penerapan teknologi dan praktik rendah karbon, termasuk penangkapan karbon, energi terbarukan, serta amonia dan hidrogen rendah karbon; dan
- Penurunan ambisi target iklim nasional maupun sektoral.

Apabila suatu rancangan kebijakan atau posisi asosiasi dinilai bertentangan dengan posisi di atas, Perusahaan menempuh langkah-langkah sebagaimana diatur pada Bagian 4.4 dokumen ini.

4. Peninjauan dan Pemantauan Keterlibatan dalam Kebijakan Iklim

PIM menetapkan mekanisme peninjauan dan pemantauan yang mencakup keterlibatan langsung dalam kebijakan publik maupun keterlibatan tidak langsung yang dilakukan melalui asosiasi produsen, asosiasi profesi, forum industri, dan organisasi lainnya. Mekanisme ini bertujuan memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan oleh atau atas nama Perusahaan tetap selaras dengan kebijakan Perusahaan terkait perubahan iklim, komitmen keberlanjutan, serta tujuan Perjanjian Paris.

4.1 Ruang Lingkup dan Pengelolaan Keanggotaan Asosiasi

Ruang lingkup mekanisme ini mencakup kegiatan advokasi, konsultasi regulasi, keterlibatan dengan pembuat kebijakan dan regulator, penyampaian masukan terhadap kebijakan dan peraturan yang diusulkan, partisipasi dalam kelompok kerja industri, serta keanggotaan pada organisasi yang dapat memengaruhi kebijakan publik pada seluruh wilayah dan yurisdiksi operasional Perusahaan. Ruang lingkup tersebut berlaku baik bagi kegiatan yang dilaksanakan oleh pegawai Perusahaan maupun oleh pihak ketiga yang bertindak atas nama Perusahaan.

Seluruh keanggotaan dan partisipasi eksternal diusulkan oleh fungsi terkait, ditinjau oleh fungsi Tata Kelola & Manajemen Risiko bersama fungsi Hukum dan Kepatuhan, serta memperoleh persetujuan sesuai kewenangan yang ditetapkan Perusahaan.

4.2 Identifikasi Asosiasi dan Organisasi yang Relevan

Fungsi-fungsi terkait bertanggung jawab mengidentifikasi asosiasi produsen, asosiasi profesi, kamar dagang, forum industri, dan organisasi lain yang diikuti oleh Perusahaan. Proses identifikasi mempertimbangkan:

- Tujuan dan relevansi organisasi terhadap kegiatan usaha Perusahaan;
- Pengaruh organisasi terhadap kebijakan publik, regulasi, atau standar industri;
- Relevansi organisasi terhadap isu keberlanjutan dan perubahan iklim;
- Nilai strategis dari keanggotaan; serta
- Potensi risiko hukum, kepatuhan, tata kelola, dan reputasi.

Hasil identifikasi dituangkan dalam daftar keanggotaan yang ditinjau sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun dan diperbarui setiap kali terdapat penambahan atau pengakhiran keanggotaan.

4.3 Peninjauan dan Pemantauan Keterlibatan terkait Perubahan Iklim

Fungsi-fungsi terkait melakukan peninjauan dan pemantauan terhadap posisi, kegiatan, serta keterlibatan kebijakan publik dari asosiasi dan organisasi yang berpotensi memengaruhi kebijakan, regulasi, atau standar industri yang berkaitan dengan perubahan iklim. Proses pemantauan tersebut meliputi:

- Meninjau posisi asosiasi mengenai isu perubahan iklim yang dinyatakan secara publik;
- Memantau partisipasi asosiasi dalam pembahasan regulasi dan kebijakan;
- Mendokumentasikan partisipasi Perusahaan dalam rapat, forum, konsultasi, dan kegiatan lainnya;
- Menilai konsistensi kegiatan asosiasi dengan komitmen iklim Perusahaan; dan
- Memelihara dokumentasi terkait keanggotaan dan kegiatan keterlibatan yang relevan.

4.3.1 Keterlibatan Langsung dalam Kebijakan Publik dan Kegiatan Lobi

Untuk keterlibatan langsung dalam kebijakan publik dan kegiatan lobi, fungsi korporat terkait melakukan peninjauan terhadap tujuan, substansi, posisi yang akan disampaikan, serta dokumen pendukung sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan. Peninjauan ini mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan internal, posisi kebijakan iklim Perusahaan

sebagaimana diuraikan pada Bagian 3.2 dan 3.3, serta potensi implikasi keterlibatan yang diusulkan terhadap penurunan emisi, efisiensi energi, pengembangan produk rendah karbon, pengelolaan limbah, dan ketahanan terhadap perubahan iklim. Posisi yang disampaikan serta hasil dari keterlibatan yang bersifat material selanjutnya didokumentasikan dan dipantau untuk mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian yang memerlukan penilaian atau tindak lanjut lebih lanjut.

Dalam kerangka tersebut, keterlibatan langsung Perusahaan dalam kebijakan publik terkait perubahan iklim dilaksanakan melalui saluran berikut:

- Partisipasi dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup. Melalui program ini, Perusahaan menyampaikan kinerja pengendalian emisi, efisiensi energi, efisiensi air, pengelolaan limbah, dan perlindungan keanekaragaman hayati kepada regulator, serta memperoleh peringkat PROPER Emas pada tahun 2025;
- Penyampaian laporan pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) secara berkala kepada instansi lingkungan hidup yang berwenang;
- Keterlibatan dalam pengembangan rantai nilai amonia rendah karbon, termasuk pelaksanaan studi kelayakan blue ammonia bersama Mitsui & Co. dan green ammonia bersama Toyo Engineering, yang memberikan masukan teknis bagi pengembangan kerangka kebijakan amonia dan hidrogen rendah karbon nasional;
- Berpartisipasi aktif serta menjadi pembicara dalam kegiatan Conference of the Parties (COP) pada UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*), bahkan sebelum bergabung sebagai salah satu member aktif United Nation Global Compact (UNGC) yaitu sejak Tahun 2023 atau COP-28 hingga saat ini;
- Kolaborasi dengan pemerintah daerah, termasuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat sekitar dalam kegiatan konservasi pesisir dan rehabilitasi ekosistem;
- Penerimaan dan penyampaian informasi dalam kunjungan kerja serta kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah dan lembaga legislatif, termasuk kunjungan kerja Wakil Gubernur Aceh, kunjungan kerja Komisi III dan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara, serta kegiatan pengawasan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; dan
- Kegiatan berbagi pengetahuan dan pengembangan kapasitas bersama perguruan tinggi dan pemangku kepentingan industri mengenai ESG, manajemen perubahan iklim, efisiensi energi, serta pengembangan produk rendah karbon.

Seluruh keterlibatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Perilaku Perusahaan dan ketentuan mengenai keterlibatan dalam politik, serta tidak digunakan untuk melemahkan, menunda, atau menghambat penerapan kebijakan iklim.

4.3.2 Asosiasi dan Organisasi

Untuk asosiasi dan organisasi yang diikuti, Perusahaan secara berkala meninjau posisi, program, inisiatif, dan kegiatan yang tersedia untuk publik terkait perubahan iklim dan keberlanjutan. Peninjauan tersebut menilai apakah kegiatan asosiasi mendukung komitmen Perusahaan terhadap penurunan emisi, efisiensi energi, pemanfaatan energi terbarukan, pengembangan produk rendah karbon, perlindungan keanekaragaman hayati, serta pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab. Hasil penilaian Perusahaan terhadap seluruh keanggotaannya disajikan pada tabel berikut.

No.	Asosiasi / Organisasi	Posisi Keikutsertaan	Posisi Iklim dan Keberlanjutan	Keselarasan terhadap Komitmen Iklim PIM	Rencana Aksi dan Pemantauan
1	International Fertilizer Association (IFA)	Anggota	IFA merupakan asosiasi pupuk global yang menyatakan komitmen industri pupuk untuk berperan dalam pencapaian tujuan 1,5°C Perjanjian Paris melalui IFA Industry Position on Decarbonizing Pathways. Bersama International Energy Agency dan European Bank for Reconstruction and Development, IFA menerbitkan Ammonia Technology Roadmap yang memetakan jalur penurunan 85–90% emisi CO_2 dari produksi amoniak hingga tahun 2050, dan sedang mengembangkan peta jalan rendah karbon untuk subsektor fosfat dan kalium. IFA juga berpartisipasi dalam Konferensi Para Pihak (COP) terkait perubahan iklim dan keanekaragaman hayati.	**Selaras** Posisi IFA mendukung komitmen iklim PIM pada penurunan emisi produksi amoniak, pengembangan amonia rendah karbon, dan efisiensi energi, serta secara eksplisit merujuk pada tujuan Perjanjian Paris.	Mempertahankan partisipasi aktif pada kelompok kerja dekarbonisasi dan amonia rendah karbon; memanfaatkan Ammonia Technology Roadmap sebagai rujukan teknis roadmap dekarbonisasi Perusahaan; meninjau posisi iklim IFA sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.
2	Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia (APPI)	Anggota	APPI merupakan asosiasi produsen pupuk nasional yang menghimpun perusahaan pupuk di Indonesia dan berperan sebagai mitra pemerintah dalam program ketahanan pangan nasional. APPI termasuk dalam asosiasi industri yang menyatakan dukungan terhadap pencapaian target Net Zero Emission sektor industri bersama Kementerian Perindustrian, serta menyelenggarakan forum dekarbonisasi bersama PT Pupuk Indonesia (Persero) yang membahas instrumen nilai ekonomi karbon dan efisiensi pemupukan. Hingga periode peninjauan, APPI belum mempublikasikan target penurunan emisi kuantitatif maupun peta jalan dekarbonisasi tingkat asosiasi yang secara eksplisit dirujuk pada tujuan Perjanjian Paris.	**Selaras sebagian** Dukungan APPI terhadap dekarbonisasi industri dan target emisi nol bersih nasional sejalan dengan komitmen iklim PIM. Tingkat kejelasan posisi iklim APPI masih terbatas karena belum tersedianya target dan peta jalan yang terukur pada tingkat asosiasi.	Mendorong penyusunan posisi iklim, target penurunan emisi, dan peta jalan dekarbonisasi tingkat asosiasi yang dirujuk pada tujuan Perjanjian Paris; menyampaikan posisi kebijakan iklim Perusahaan dalam forum APPI; meninjau posisi dan kegiatan APPI sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun dan setiap kali terdapat pernyataan kebijakan baru.
3	United Nations Global Compact (UNGC)	Peserta sejak 10 Juni 2025	UNGC merupakan inisiatif keberlanjutan korporasi global yang menetapkan Sepuluh Prinsip, termasuk prinsip-prinsip lingkungan mengenai pendekatan pencegahan, tanggung jawab lingkungan, dan pengembangan teknologi ramah lingkungan. UNGC mendorong perusahaan menetapkan target iklim berbasis sains yang selaras dengan pembatasan kenaikan suhu hingga 1,5°C serta pencapaian emisi nol bersih. Keikutsertaan Perusahaan tercatat berstatus aktif pada basis data peserta UNGC, disertai Letter of Commitment yang dipublikasikan secara terbuka.	**Selaras** Prinsip dan kampanye iklim UNGC mendukung komitmen PIM terhadap penurunan emisi, pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab, dan penguatan tata kelola keberlanjutan.	Menyusun dan menyampaikan Communication on Progress (CoP) pertama kepada UNGC paling lambat 31 Juli 2027; melanjutkan penyelarasan kebijakan dan pelaporan keberlanjutan Perusahaan dengan Sepuluh Prinsip UNGC; menggunakan rujukan UNGC dalam penguatan target iklim Perusahaan; meninjau perkembangan posisi dan panduan iklim UNGC secara berkala.

Hasil peninjauan menunjukkan bahwa seluruh asosiasi dan organisasi yang diikuti Perusahaan mendukung aspek-aspek yang relevan dengan komitmen PIM di bidang perubahan iklim dan keberlanjutan, dan tidak ditemukan posisi yang menentang kebijakan iklim atau berupaya melemahkan regulasi terkait iklim. Perusahaan tidak menjadi anggota asosiasi yang diketahui melakukan advokasi yang bertentangan dengan tujuan Perjanjian Paris. Perusahaan akan terus memantau posisi dan kegiatan asosiasi maupun organisasi tersebut untuk memastikan bahwa keanggotaan dan partisipasinya tetap selaras dengan kebijakan Perusahaan serta tidak menghambat pelaksanaan aksi iklim yang kredibel.

4.4 Kerangka Penanganan Ketidakselarasan

Apabila peninjauan menemukan ketidakselarasan antara posisi kebijakan iklim suatu asosiasi dan posisi kebijakan iklim Perusahaan sebagaimana diuraikan pada Bagian 3.2 dan 3.3, Perusahaan menerapkan kerangka penanganan dengan opsi tindakan sebagai berikut:

- Keterlibatan langsung dengan asosiasi terkait. Perusahaan menyampaikan keberatan secara tertulis kepada pengurus asosiasi, menguraikan posisi kebijakan iklim Perusahaan, dan meminta perbaikan posisi asosiasi dalam jangka waktu yang disepakati. Perkembangan keterlibatan tersebut ditinjau dalam tenggat waktu yang telah ditetapkan dan dieskalasikan apabila tidak terdapat kemajuan yang memadai;
- Penyampaian pernyataan publik yang membedakan posisi Perusahaan dari posisi asosiasi. Perusahaan dapat menyampaikan posisi independennya secara publik, termasuk melalui laporan keberlanjutan, laporan iklim, dan kanal komunikasi resmi Perusahaan, sehingga posisi Perusahaan tidak diasosiasikan dengan posisi yang tidak selaras;
- Pembentukan koalisi proaktif bersama anggota lain atau pemangku kepentingan lain yang memiliki posisi iklim yang selaras, untuk mengimbangi advokasi yang tidak selaras dengan tujuan Perjanjian Paris; dan
- Peninjauan kembali atau pengakhiran keanggotaan. Apabila ketidakselarasan bersifat material dan tidak terdapat perbaikan setelah proses keterlibatan dan eskalasi dijalankan, Perusahaan mempertimbangkan penghentian partisipasi pada kegiatan tertentu atau pengakhiran keanggotaan pada asosiasi tersebut.

Pemilihan opsi tindakan mempertimbangkan tingkat materialitas ketidakselarasan, pengaruh asosiasi terhadap kebijakan publik, nilai strategis keanggotaan, serta kemungkinan tercapainya perbaikan. Setiap tindakan yang diambil disertai dengan penanggung jawab, batas waktu, dan indikator keberhasilan yang jelas, serta ditinjau pada periode peninjauan berikutnya.

4.5 Eskalasi atas Potensi Ketidakselarasan

Setiap potensi ketidakselarasan antara posisi Perusahaan terkait perubahan iklim dan kegiatan atau posisi suatu asosiasi disampaikan melalui struktur tata kelola yang telah ditetapkan untuk dilakukan penilaian lebih lanjut. Penilaian awal dilakukan oleh fungsi Tata Kelola & Manajemen Risiko bersama fungsi teknis terkait. Hal-hal yang bersifat material dieskalasikan kepada Direksi, selanjutnya kepada Komite Tata Kelola Terintegrasi, Pemantau Risiko, dan Investasi, serta kepada Dewan Komisaris apabila diperlukan. Proses eskalasi ini mendukung penetapan tindak lanjut yang tepat sesuai kerangka pada Bagian 4.4.

4.6 Dokumentasi dan Pelaporan

Fungsi-fungsi terkait memelihara dokumentasi mengenai keanggotaan asosiasi, partisipasi dalam organisasi, keterlibatan eksternal dalam kebijakan publik, hasil penilaian keselarasan iklim, kasus potensi ketidakselarasan yang teridentifikasi, keputusan dan persetujuan, serta tindak lanjut yang dilakukan.

Perusahaan melaporkan kegiatan lobi langsung yang terkait dengan perubahan iklim serta posisi dan kegiatan kebijakan iklim asosiasi yang diikutinya melalui dokumen ini, yang ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala apabila dibutuhkan dan terdapat perubahan didalamnya, serta melalui Laporan Keberlanjutan Perusahaan. Melalui mekanisme tersebut, PIM menerapkan sistem pengelolaan dengan pembagian tanggung jawab yang jelas untuk identifikasi, peninjauan, pemantauan, pendokumentasian, dan pengawasan terhadap keterlibatan dalam kebijakan publik serta keanggotaan pada asosiasi.

PT PUPUK ISKANDAR MUDA

Lobbying and Trade Associations Climate Alignment

Guideline on Climate Alignment of Public Policy Engagement and Association Memberships

2026

APPROVAL STATEMENT

LOBBYING AND TRADE ASSOCIATIONS CLIMATE ALIGNMENT

This Lobbying and Trade Associations – Climate Alignment document has been reviewed and approved as a guideline and a demonstration of PT Pupuk Iskandar Muda's commitment to ensuring that the Company's engagement in public policy and participation in trade associations are aligned with the Company's climate strategy and the objectives of the Paris Agreement.

PT Pupuk Iskandar Muda
Board of Directors,

Filius Yuliandi
Direktur Utama

Guntur Prasetyo
Direktur Operasi & Produksi

Koko Sudiro
Direktur Keuangan & Umum

Maimun
Direktur Manajemen Risiko

Table of Contents

1. PIM's Commitment to Climate Action 18
1.1 Driver for Climate Alignment 18
1.2 PIM's Commitment on Climate Involvement 18
2. Governance Structure and Accountability for Climate Alignment 19
2.1 Sustainability and Climate Governance Structure 20
2.2 Board of Commissioners Oversight 20
2.3 Role of the Board of Directors and the ESG Development and Implementation Team 20
2.4 Accountability for Public Policy Engagement and Association Memberships 20
3. PIM's Climate Policy Position 21
3.1 Climate-Related Policy Framework 21
3.2 Public Policy Positions Supported by the Company 22
3.3 Public Policy Positions Not Supported by the Company 23
4. Review and Monitoring of Climate Policy Engagements 23
4.1 Scope and Management of Association Memberships 24
4.2 Identification and Management of Relevant Associations 24
4.3 Review and Monitoring of Climate-Related Engagements 24
4.3.1 Direct Public Policy Engagements and Lobbying Activities 24
4.3.2 Associations and Organizations 25
4.4 Framework for Addressing Misalignment 27
4.5 Escalation of Potential Misalignment 27
4.6 Documentation and Reporting 27

1. PIM's Commitment to Climate Action

1.1 Driver for Climate Alignment

PT Pupuk Iskandar Muda ("PIM" or the "Company") is a subsidiary of PT Pupuk Indonesia (Persero) that produces ammonia, urea, NPK fertilizer, and hydrogen peroxide in Krueng Geukueh, North Aceh Regency, Aceh Province. The Company recognizes that public policy engagement, whether conducted directly or through producer associations, professional associations, chambers of commerce, industry forums, and other organizations, may influence the development of policies, regulations, and standards applicable to the fertilizer and petrochemical industry.

Ammonia and urea production is energy-intensive and generates material greenhouse gas emissions. Given these characteristics, public policies concerning carbon pricing, energy conservation and efficiency, carbon capture technology, the development of low-carbon ammonia and hydrogen, environmental management, and fertilizer governance have a direct bearing on the Company's emissions profile, cost structure, and investment plans. The Company therefore regards engagement in public policy processes as inseparable from its climate commitments.

In this document, climate alignment refers to the extent to which PIM's policy positions, advocacy activities, regulatory engagement, and participation in industry associations are consistent with credible greenhouse gas emissions-reduction pathways and the objectives of the Paris Agreement, namely holding the increase in the global average temperature to well below 2°C above pre-industrial levels and pursuing efforts to limit the increase to 1.5°C.

Climate alignment is not limited to a general statement of support for climate action. Assessing alignment requires consideration of both current and forward-looking information, including stated policy positions, advocacy activities actually undertaken, regulatory submissions, transition plans, implementation measures, and the consistency of such activities over time. A credible assessment therefore considers not only what the Company or an association publicly commits to, but also whether its actions effectively support the transition toward low greenhouse gas emissions and climate-resilient development.

At the same time, inadequately governed advocacy activities may create a risk of inconsistency between the Company's climate commitments and the positions communicated by the Company, its representatives, or the associations in which it participates. Such inconsistencies may arise where an engagement or association position seeks to weaken, delay, obstruct, or remove climate-related regulations, emissions-reduction targets, energy-efficiency requirements, environmental safeguards, or other measures supporting the transition toward a low-carbon economy.

1.2 PIM's Commitment on Climate Involvement

PIM considers the alignment of its lobbying and association activities to be an integral part of climate governance, risk management, and corporate accountability. This approach applies across all jurisdictions and locations in which the Company operates, including its plant complex, employee housing areas, representative offices, and distribution and marketing activities, while taking into account the applicable laws, regulations, and policy context of each jurisdiction.

In implementing this commitment, the Company applies a structured approach to:

- Identify climate-relevant public policy engagements and memberships in associations and organizations;
- Establish clear responsibilities and approval mechanisms;
- Assess direct and indirect advocacy positions against the Company's climate commitments;

- Monitor both current activities and forward-looking policy positions;
- Maintain reliable and verifiable supporting evidence;
- Identify potential gaps or misalignment; and
- Implement proportionate and time-bound corrective actions.

The Company acknowledges that no single indicator or public statement is sufficient to demonstrate climate alignment. Assessments must be supported by a combination of relevant evidence, including official policy statements, responses to public consultations, submissions on draft regulations, meeting records, working-group activities, public communications, positions taken in association decision-making, and documented advocacy outcomes. Where information is incomplete or insufficient, the Company does not assume alignment, but instead seeks further clarification or classifies the engagement according to the actual circumstances.

Accordingly, PIM is committed to ensuring that all public policy engagement and association membership activities are conducted ethically, transparently, responsibly, and consistently with:

- The objectives of the Paris Agreement to hold the increase in the global average temperature to well below 2°C and pursue efforts to limit it to 1.5°C;
- The climate policies, commitments, and targets of the Government of the Republic of Indonesia, including Indonesia's Nationally Determined Contribution (NDC) and the Net Zero Emission target of 2060 or sooner;
- The Company's climate change strategy and decarbonization roadmap, comprising Clean Ammonia, solar power plants (PLTS), Renewable Energy Certificates (REC), conservation area management, and energy efficiency;
- The Company's Sustainability Policy, environmental policies, and climate risk management approach;
- The Ten Principles of the United Nations Global Compact (UNGC), in particular its environmental principles; and
- The principles of good corporate governance.

Through this framework, PIM ensures that its public policy engagement, whether conducted directly or through associations, supports and does not obstruct the implementation of effective climate action. The Company also aims to strengthen transparency, safeguard the credibility of its climate commitments, manage regulatory and reputational risks, and contribute constructively to the transformation of the fertilizer and petrochemical industry toward low-carbon, resource-efficient, and climate-resilient production.

2. Governance Structure and Accountability for Climate Alignment

2.1 Sustainability and Climate Governance Structure

PIM places governance as the fundamental foundation for ensuring the effective management of climate-related risks and opportunities. The Board of Commissioners and the Board of Directors play a strategic role in overseeing, directing, and evaluating the Company's climate policies and strategies, which are integrated into short-, medium-, and long-term business planning. This oversight is carried out through regular meetings, performance reporting, and the review of progress on decarbonization and resource efficiency initiatives.

This governance structure provides the basis for managing the Company's public policy engagement and association memberships, so that every position communicated by or on behalf of the Company has a clear line of accountability up to the Board of Directors and the Board of Commissioners.

2.2 Board of Commissioners Oversight

Oversight by the Board of Commissioners of Environmental, Social, and Governance (ESG) and climate change matters, including the management of climate-related risks and opportunities, is exercised through the Integrated Governance, Risk Monitoring, and Investment Committee. The Committee issues the ESG Policy and Implementation Review of PT Pupuk Iskandar Muda every semester, or twice a year. This review document provides a channel for the Board of Commissioners to convey its views and to improve the quality of ESG implementation, including climate change management and the alignment of the Company's public policy engagement.

2.3 Role of the Board of Directors and the ESG Development and Implementation Team

Executive-level oversight is exercised by the President Director together with the Director of Operations & Production, the Director of Finance & General Affairs, and the Director of Risk Management. The Board of Directors is responsible for ensuring that climate change and ESG matters are adequately implemented, including ensuring that the Company's public policy positions remain consistent with its climate commitments.

Operational implementation is carried out by the ESG Development and Implementation Team, initially established under Board of Directors Decree No. 50/SK/DU/IM/V/2024. The team is led by the President Director, operates under the coordination of the Board of Directors, and is coordinated on a day-to-day basis by the Senior Vice President (SVP) of Governance & Risk Management. Implementation responsibilities for each sustainability pillar are carried out by the relevant managerial functions with clear lines of accountability, in which the respective coordinators act as risk owners authorized to identify, assess, and manage risks and opportunities within their scope of responsibility. The Board of Directors Decree has been periodically updated to date.

The SVP of Governance & Risk Management reports regularly to the Board of Directors through monthly meetings, while reports to the Board of Directors and the Board of Commissioners are submitted on a semester basis. Key Performance Indicators (KPIs) related to sustainability influence the incentives of the Board of Directors, covering, among others, carbon emissions reduction and ESG ratings. Accountability for climate alignment, including the alignment of public policy engagement, is therefore linked directly to performance assessment at the executive level.

2.4 Accountability for Public Policy Engagement and Association Memberships

The management of association memberships, organizational activities, and external engagements is coordinated by the relevant corporate functions under the supervision of the President Director, with responsibilities allocated as follows:

- The Governance & Risk Management function is responsible for coordinating climate alignment assessments, monitoring association positions, and maintaining documentation;
- The Occupational Health, Safety & Environment function is responsible for technical matters relating to emissions, energy efficiency, pollution control, and environmental performance;
- The Corporate Social Responsibility and Public Relations functions are responsible for public communications and stakeholder engagement;
- The Business Development function is responsible for engagements relating to low-carbon product and business development; and
- The Legal and Compliance function is responsible for ensuring that engagements comply with laws and regulations, the Good Corporate Governance Guidelines, the Code of Conduct, and the Company's policy on political involvement.

This coordination is intended to ensure that all memberships and external participation provide strategic and operational value to the Company, comply with applicable laws and internal policies,

support the Company's sustainability and climate commitments, and remain consistent with the public policy positions set out in this document.

3. PIM's Climate Policy Position

3.1 Climate-Related Policy Framework

PIM has established a policy framework that guides the integration of sustainability and climate-related considerations into the Company's governance, strategy, and operations. The framework comprises:

- The PT Pupuk Iskandar Muda Sustainability Policy 2025, which sets out commitments across environmental, social, and governance aspects, including greenhouse gas emissions reduction, resource conservation, biodiversity protection, waste management, and the strengthening of sustainability governance across the value chain;
- The PT Pupuk Iskandar Muda Management System Policy, which integrates the ISO 14001:2015 Environmental Management System, ISO 50001:2018 Energy Management System, ISO 9001:2015 Quality Management System, the Occupational Health and Safety Management System under Government Regulation No. 50 of 2012, the ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System, and other management systems;
- The Conventional Air Pollution and Greenhouse Gas Reduction Policy, with a maximum emissions intensity target of 1.3 tons CO_2 equivalent per ton of product per year, covering emissions inventory, substitution of energy sources with solar power, planning of the blue ammonia program, and emissions capture technology innovation;
- The Energy Efficiency Policy, with an energy conservation and efficiency target of 1.1% per year, covering energy audits, replacement of inefficient equipment, and innovation in substituting fossil energy with renewable energy;
- The Water Efficiency and Wastewater Load Reduction Policy, with a water efficiency target of 2% per year and a wastewater pollution load reduction target of 5% per year for total nitrogen and ammonia parameters;
- The Hazardous Waste Reduction and Utilization Policy (2% per year) and the Non-Hazardous Solid Waste 3R Policy (3% per year);
- The Life Cycle Assessment Policy, which provides the basis for identifying critical points of environmental impact across energy, emissions, water, and waste aspects;
- The Waste Management Policy, which applies the Reduce, Reuse, and Recycle (3R) principles, with a target of reducing, reusing, or recycling 5% of total annual waste generation;
- The Biodiversity Protection Policy, covering the management of an 85-hectare conservation area through tree planting and flora and fauna conservation activities;
- The Social and Environmental Responsibility Policy; and
- The Integrated Risk Management Policy and Guidelines which are based on ISO 31000:2018.

Collectively, these policies provide the foundation for managing environmental impacts, improving energy efficiency, reducing greenhouse gas emissions, protecting biodiversity, and strengthening operational resilience. The Company recognizes that general sustainability commitments are not sufficient to demonstrate credible climate alignment. This policy framework is therefore complemented by explicit positions on specific public policy issues, as set out below.

3.2 Public Policy Positions Supported by the Company

PIM states the following positions on climate-related public policy developments applicable to the fertilizer and petrochemical sector in Indonesia. These positions serve as the reference for all public

policy engagement conducted by or on behalf of the Company, and as the benchmark for assessing the alignment of the associations in which the Company participates.

Public Policy Issue	PIM's Position	Basis and Explanation of Position
Achievement of Indonesia's Nationally Determined Contribution (NDC) and the Net Zero Emission target of 2060 or sooner	Support	The Company supports the setting and strengthening of national emissions-reduction targets and their implementing frameworks. The Company's climate change strategy is designed to support the achievement of these targets through five main programs: Clean Ammonia, solar power plants, Renewable Energy Certificates, conservation area management, and energy efficiency.
Implementation of carbon pricing, including the carbon tax and carbon trading (Presidential Regulation No. 98 of 2021 and Law No. 7 of 2021)	Support	The Company supports the implementation of carbon pricing instruments applied in a phased, predictable manner and based on verified emissions data. The Company regards carbon pricing as a means of driving investment in low-carbon technologies, and has developed decarbonization scenarios to anticipate the introduction of fiscal obligations related to carbon emissions. The Company does not support delaying the introduction of such instruments.
Regulatory framework for carbon capture and storage (Presidential Regulation No. 14 of 2024 and its implementing regulations)	Support	The Company supports the establishment of regulatory, permitting, and governance frameworks for carbon storage that provide legal certainty for CCS/CCUS investment. The Company plans a CCS/CCUS utilization program for its Ammonia Plant, using the Arun Gas Field as a CO_2 storage facility, in 2031.
Development of low-carbon ammonia and hydrogen as part of the national energy transition	Support	The Company supports policies that advance low-carbon ammonia and hydrogen value chains, including clarity of definitions, standards, and certification schemes for low-carbon products. The Company has completed feasibility studies for a blue ammonia plant with Mitsui & Co. and for a green ammonia plant with Toyo Engineering.
Energy conservation and efficiency in the industrial sector (Government Regulation No. 33 of 2023)	Support	The Company supports obligations relating to energy management, energy audits, and energy consumption reporting for large energy users. The Company applies the ISO 50001:2018 Energy Management System and has set an energy efficiency target of 1.1% per year.
Expanded use of renewable energy and renewable energy attribute instruments	Support	The Company supports policies that expand industrial access to renewable energy, including the use of solar power generation and Renewable Energy Certificates. The Company operates solar power installations at its Bagging Building and Training Building facilities and applies RECs at the PIM-2 Plant and the NPK Chemical Plant.
Strengthened greenhouse gas inventory, reporting, and verification obligations, including reporting through the National Registry System	Support	The Company supports broader coverage and improved quality of emissions reporting, including a phased expansion toward Scope 3 reporting. The Company has calculated Scope 1 and Scope 2 emissions and discloses its emissions performance in its Sustainability Report and TCFD Report.
Adoption of climate-related financial disclosure standards (OJK Regulation No. 51/POJK.03/2017 and the adoption of international	Support	The Company supports the adoption of consistent and comparable climate disclosure standards, and has prepared reporting with reference to the recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

Public Policy Issue	PIM's Position	Basis and Explanation of Position
sustainability disclosure standards)		
Development of green industry and green industry standards (Law No. 3 of 2014)	Support	The Company supports the establishment of green industry standards, including energy and emissions intensity thresholds for production processes, and incentives for the adoption of cleaner production technologies.
Environmental protection and management and pollution control (Law No. 32 of 2009 and Government Regulation No. 22 of 2021), including the PROPER program	Support	The Company supports the application of stringent environmental quality standards and beyond-compliance performance rating mechanisms. The Company participates in the Environmental Performance Rating Program (PROPER) and obtained the Gold PROPER rating in 2025. The Company does not support the relaxation of environmental quality standards.
Improved fertilizer-use efficiency and precision nutrient management to reduce downstream emissions	Support	The Company supports policies and extension programs that promote the application of fertilizers in the right quantity and at the right time, as such practices contribute to reducing nitrous oxide (N_2O) emissions in the agricultural sector while maintaining productivity.

3.3 Public Policy Positions Not Supported by the Company

PIM does not support public policies or advocacy activities that unnecessarily weaken, delay, or obstruct credible climate action. In particular, the Company does not support:

- The relaxation or postponement of emission limits, wastewater quality standards, and other environmental protection requirements;
- The postponement or weakening of carbon pricing instruments, including the carbon tax and carbon trading;
- The weakening of greenhouse gas inventory, reporting, and verification obligations, including the narrowing of reporting boundaries;
- The weakening or postponement of energy conservation and efficiency obligations for large energy users;
- The creation of avoidable barriers to low-carbon technologies and practices, including carbon capture, renewable energy, and low-carbon ammonia and hydrogen; and
- Any reduction in the ambition of national or sectoral climate targets.

Where a draft policy or an association position is assessed as inconsistent with the positions above, the Company applies the measures set out in Section 4.4 of this document.

4. Review and Monitoring of Climate Policy Engagements

PIM has established a review and monitoring mechanism covering both direct public policy engagement and indirect engagement conducted through producer associations, professional associations, industry forums, and other organizations. The mechanism is intended to ensure that all activities undertaken by or on behalf of the Company remain consistent with the Company's climate-related policies, sustainability commitments, and the objectives of the Paris Agreement.

4.1 Scope and Management of Association Memberships

The scope of this mechanism covers advocacy activities, regulatory consultations, engagement with policymakers and regulators, the submission of input on proposed policies and regulations,

participation in industry working groups, and membership in organizations that may influence public policy across all of the Company's operational areas and jurisdictions. This scope applies both to activities carried out by Company employees and to those carried out by third parties acting on behalf of the Company.

All memberships and external participation are proposed by the relevant function, reviewed by the Governance & Risk Management function together with the Legal and Compliance function, and approved in accordance with the Company's established authority levels.

4.2 Identification and Management of Relevant Associations

The relevant functions are responsible for identifying producer associations, professional associations, chambers of commerce, industry forums, and other organizations in which the Company participates. The identification process considers:

- The purpose and relevance of the organization to the Company's business activities;
- Its influence on public policy, regulations, or industry standards;
- Its relevance to sustainability and climate-related matters;
- The strategic value of the membership; and
- Potential legal, compliance, governance, and reputational risks.

The results of this identification are recorded in a membership register, which is reviewed at least once a year and updated whenever a membership is added or terminated.

4.3 Review and Monitoring of Climate-Related Engagements

The relevant functions review and monitor the positions, activities, and public policy engagement of associations and organizations that may influence climate-related policies, regulations, or industry standards. The monitoring process includes:

- Reviewing the publicly stated climate positions of associations;
- Monitoring their participation in regulatory and policy discussions;
- Documenting the Company's participation in meetings, forums, consultations, and other activities;
- Assessing the consistency of association activities with the Company's climate commitments; and
- Maintaining records of relevant memberships and engagement activities.

4.3.1 Direct Public Policy Engagements and Lobbying Activities

For direct public policy engagements and lobbying activities, the relevant corporate functions review the purpose, subject matter, intended position, and supporting materials before the engagement is conducted. The review considers applicable laws and regulations, internal policies, the Company's climate policy positions as set out in Sections 3.2 and 3.3, and the potential implications of the proposed engagement for emissions reduction, energy efficiency, low-carbon product development, waste management, and climate resilience. The positions communicated and the outcomes of material engagements are subsequently documented and monitored to identify any potential inconsistency requiring further assessment or follow-up.

Within this framework, the Company conducts direct climate-related public policy engagement through the following channels:

- Participation in the Environmental Performance Rating Program (PROPER) administered by the Ministry of Environment. Through this program, the Company reports its performance in emissions control, energy efficiency, water efficiency, waste management, and biodiversity protection to the regulator, and obtained the Gold PROPER rating in 2025;

- Periodic submission of Environmental Management Plan and Environmental Monitoring Plan (RKL-RPL) implementation reports to the competent environmental authorities;
- Engagement in the development of low-carbon ammonia value chains, including feasibility studies for blue ammonia with Mitsui & Co. and for green ammonia with Toyo Engineering, which provide technical input to the development of national low-carbon ammonia and hydrogen policy frameworks;
- Active participation in and contributions as a speaker at the Conferences of the Parties (COP) under the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), beginning with COP28 in 2023 and continuing to the present, even before becoming an active member of the United Nations Global Compact (UNGC);
- Collaboration with regional government institutions, including the Regency Environmental Agency, non-governmental organizations, and local communities in coastal conservation and ecosystem rehabilitation activities;
- Receiving and providing information during working visits and oversight activities conducted by government and legislative institutions, including the working visit of the Deputy Governor of Aceh, the working visits of Commission III and the Special Committee of the North Aceh Regional House of Representatives, and oversight activities of Commission IV of the House of Representatives of the Republic of Indonesia; and
- Knowledge-sharing and capacity-building activities with universities and industry stakeholders on ESG, climate change management, energy efficiency, and low-carbon product development.

All such engagements are conducted in accordance with the Company's Code of Conduct and its provisions on political involvement, and are not used to weaken, delay, or obstruct the implementation of climate policy.

4.3.2 Associations and Organizations

For the associations and organizations in which it participates, the Company periodically reviews their publicly available positions, programs, initiatives, and activities relating to climate change and sustainability. The review assesses whether these activities support the Company's commitments to emissions reduction, energy efficiency, renewable energy, low-carbon product development, biodiversity protection, and responsible environmental management. The results of the Company's assessment of all its memberships are presented in the table below.

No.	Association / Organization	Membership Status	Climate and Sustainability Position	Alignment with PIM's Climate Commitments	Action Plan and Monitoring
1	International Fertilizer Association (IFA)	Member	IFA is the global fertilizer association and has stated the industry's commitment to playing its part in achieving the 1.5°C goal of the Paris Agreement through the IFA Industry Position on Decarbonizing Pathways. Together with the International Energy Agency and the European Bank for Reconstruction and Development, IFA published the Ammonia Technology Roadmap, which maps pathways to reduce 85–90% of CO_2 emissions from ammonia production by 2050, and is developing a low-carbon roadmap for the phosphate and potash subsectors. IFA also participates in Conference of the Parties (COP) events on climate change and biodiversity.	**Aligned** IFA's positions support PIM's climate commitments on ammonia production emissions reduction, low-carbon ammonia development, and energy efficiency, and refer explicitly to the objectives of the Paris Agreement.	Maintain active participation in decarbonization and low-carbon ammonia working groups; use the Ammonia Technology Roadmap as a technical reference for the Company's decarbonization roadmap; review IFA's climate positions at least once a year.
2	Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia (APPI)	Member	APPI is the national fertilizer producers' association, bringing together fertilizer companies in Indonesia and acting as a partner to the government in the national food security program. APPI is among the industry associations that have declared support for the industrial sector's Net Zero Emission target together with the Ministry of Industry, and has convened decarbonization forums with PT Pupuk Indonesia (Persero) addressing carbon pricing instruments and fertilizer-use efficiency. As at the review period, APPI has not published quantitative emissions-reduction targets or an association-level decarbonization roadmap explicitly referenced to the objectives of the Paris Agreement.	**Partially Aligned** APPI's support for industrial decarbonization and the national net-zero target is consistent with PIM's climate commitments. The clarity of APPI's climate position remains limited in the absence of measurable association-level targets and a roadmap.	Encourage the development of an association-level climate position, emissions-reduction targets, and a decarbonization roadmap referenced to the objectives of the Paris Agreement; communicate the Company's climate policy positions within APPI forums; review APPI's positions and activities at least once a year and whenever new policy statements are issued.
3	United Nations Global Compact (UNGC)	Participant since 10 June 2025	UNGC is a global corporate sustainability initiative that sets out Ten Principles, including environmental principles on the precautionary approach, environmental responsibility, and the development of environmentally friendly technologies. UNGC encourages companies to set science-based climate targets aligned with limiting warming to 1.5°C and achieving net-zero emissions. The Company's participation is recorded as active in the UNGC participant database, supported by a publicly available Letter of Commitment.	**Aligned** UNGC's principles and climate campaigns support PIM's commitments to emissions reduction, responsible environmental management, and the strengthening of sustainability governance.	Prepare and submit the Company's first Communication on Progress (CoP) to the UNGC by 31 July 2027; continue aligning the Company's sustainability policies and reporting with the Ten Principles of the UNGC; use UNGC guidance in strengthening the Company's climate targets; review developments in UNGC climate positions and guidance periodically.

The review indicates that all associations and organizations in which the Company participates support elements relevant to PIM's climate and sustainability commitments, and that no positions opposing climate policy or seeking to weaken climate-related regulation were identified. The Company is not a member of any association known to advocate positions contrary to the objectives of the Paris Agreement. The Company will continue to monitor their positions and activities to ensure that its membership and participation remain consistent with the Company's policies and do not obstruct credible climate action.

4.4 Framework for Addressing Misalignment

Where a review identifies a misalignment between an association's climate policy position and the Company's climate policy positions as set out in Sections 3.2 and 3.3, the Company applies a framework comprising the following options:

- Direct engagement with the association concerned. The Company submits its objection in writing to the association's management, sets out the Company's climate policy positions, and requests that the association revise its position within an agreed timeframe. Progress is reviewed against the agreed deadline and escalated where insufficient progress is made;
- Issuing public statements distancing the Company from the association's position. The Company may communicate its independent position publicly, including through its sustainability report, climate report, and official communication channels, so that the Company's position is not associated with a misaligned one;
- Forming proactive coalitions with other members or stakeholders holding aligned climate positions, in order to counter advocacy that is inconsistent with the objectives of the Paris Agreement; and
- Reconsidering or terminating the membership. Where the misalignment is material and no improvement results from the engagement and escalation process, the Company considers withdrawing from specific activities or terminating its membership in the association.

The selection of options takes into account the materiality of the misalignment, the association's influence on public policy, the strategic value of the membership, and the likelihood of achieving improvement. Each action is assigned a responsible officer, a deadline, and clear success indicators, and is reviewed in the following review cycle.

4.5 Escalation of Potential Misalignment

Any potential misalignment between the Company's climate-related positions and the activities or positions of an association is submitted through the established governance structure for further assessment. The initial assessment is conducted by the Governance & Risk Management function together with the relevant technical functions. Material matters are escalated to the Board of Directors, subsequently to the Integrated Governance, Risk Monitoring, and Investment Committee, and to the Board of Commissioners where necessary. This escalation process supports the determination of appropriate follow-up actions under the framework in Section 4.4.

4.6 Documentation and Reporting

The relevant functions maintain documentation regarding association memberships, organizational participation, external public policy engagement, climate alignment assessment results, identified cases of potential misalignment, decisions and approvals, and follow-up actions.

The Company reports on its climate-related direct lobbying activities and on the climate policy positions and activities of its associations through this document, which is reviewed and updated periodically, as needed and when changes occur, and through its Sustainability Report. Through these mechanisms, PIM maintains a management system with clearly assigned responsibilities for the identification, review, monitoring, documentation, and oversight of public policy engagement and association memberships.